



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
BARITO KUALA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama Tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023–2026 yaitu:

### **Visi:**

**“ TERWUJUDNYA BARITO KUALA YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI  
BERBASIS AGRIBISNIS “**

### **Misi:**

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan local dengan mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
2. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

Marabahan, Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten BaritoKuala



**H.ARDIA NSYAH,S.Sos,M.AP**  
NIP.196505081986021004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

*Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan* telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini, *Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan* dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil pengukuran terhadap Indikator.

Kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan dibagi dalam kategori:

- Pencapaian sesuai target sebesar 100%
- Melampaui/melebihi target >100%
- Tidak mencapai target <100%.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada 3 (tiga) indikator dengan capaian 1 (satu) indikator melebihi target dan 2 (dua) indikator tidak mencapai target.

**CAPAIAN IKU DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024	
			Target	Realisasi
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	180	182,79
2.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	21.662	21.116,879
3.	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai	81,93	79,69

Berdasarkan Perjanjian Kinerja *Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan* Tahun 2024 ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator sasaran dan mengacu pada misi ke 1 (satu) RPD yaitu “Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis pada Potensi dan Keunggulan Lokal dengan Mengoptimalkan Pengelolaan SDA untuk Menjamin Kelanjutan Pembangunan dan Menjaga Keseimbangan Lingkungan”.

**“Tabel Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2024”**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Meningkatnya kemandirian, diversifikasi dan keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100	182,79	101,55	-	-	-	-
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	97,48	-	-	-	-	21.116,879	97,48
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	97,26	-	-	-	-	79,69	97,26

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I. Latar Belakang.....	1
II. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
III. Isu Strategis.....	5
IV. Landasan Hukum.....	6
V. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
I. Perencanaan Strategis.....	8
2.1 Tujuan.....	8
2.2 Sasaran.....	8
2.3 Indikator.....	8
II. Perjanjian Kinerja.....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
I. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.....	15
II. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis.....	18
III. Akuntabilitas Keuangan.....	42
IV Analisa Efisiensi.....	44
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>46</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026	9
Tabel 2.2	Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	10
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	15
Tabel 3.2	Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai	15
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	16
Tabel 3.4	Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Persentase Tahun 2024	17
Tabel 3.5	Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Kategori Tahun 2024	17
Tabel 3.6	Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala	18
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	19
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	19
Tabel 3.9	Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	20
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian, Diversifikasi dan Keamanan Pangan Tahun 2024	21
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2024	23
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	23

Tabel 3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2024 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	24
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja Utama Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional	24
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tahun 2024	28
Tabel 3.16	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2024	29
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya	30
Tabel 3.18	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2024 Jumlah Produksi Perikanan	30
Tabel 3.19	Perbandingan Capaian Kinerja Utama Jumlah Produksi Perikanan dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional	31
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD Tahun 2024	34
Tabel 3.21	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2024	35
Tabel 3.22	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya	35
Tabel 3.23	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP SKPD Terhadap Target Tahun 2026	36
Tabel 3.24	Perbandingan Capaian Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP SKPD dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional	37
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu	41
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dengan Capaian Target Renstra	41
Tabel 3.27	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Provinsi dan Nasional	42
Tabel 3.28	Komposisi Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024	42
Tabel 3.29	Pagu dan Realisasi Anggaran yang terkait dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024	43
Tabel 3.30	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	43
Tabel 3.31	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024	44



## BAB I PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kepala Dinas sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala di Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan



pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 yang dimaksudkan, sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah daerah di bidang Pangan dan Perikanan.

Sesuai dengan kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan memiliki **tugas pokok**:

“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten”.

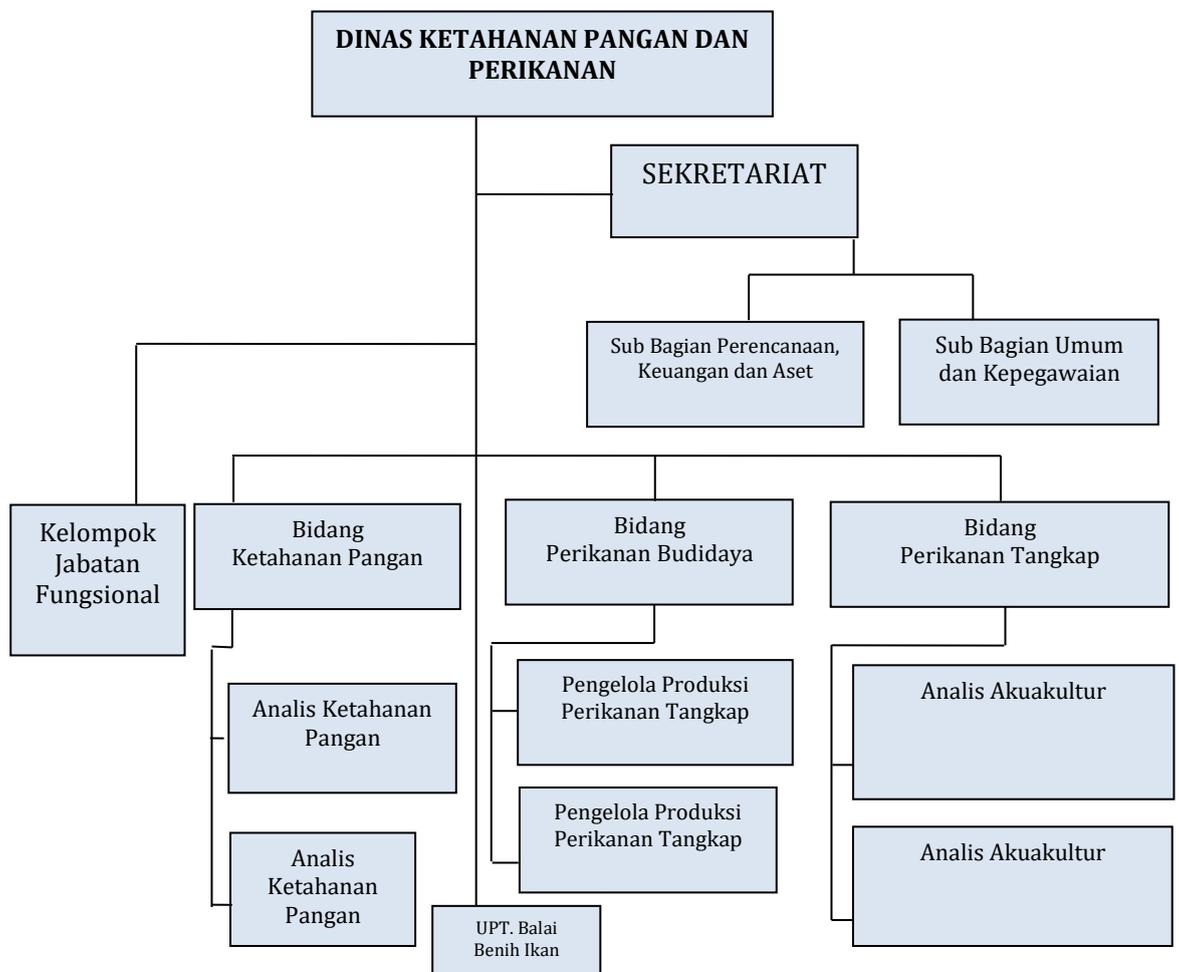


Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki **fungsi**:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Ketahanan Pangan dan Perikanan.
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan perikanan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi ketahanan pangan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala yang dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Kasubbag, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tergambar pada Struktur Organisasi berikut:

**Gambar 1.**  
**Bagan Susunan Organisasi Dinas**  
**Ketahanan Pangan dan Perikanan**  
**Kabupaten BaritoKuala**





### III. ISU STRATEGIS

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala terdapat beberapa **permasalahan**, yaitu:

1. Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Barito Kuala masih rendah karena pola makan masyarakat masih belum beragam, bergizi seimbang dan masih didominasi bahan makan berupa beras.
2. Penanganan distribusi pangan melalui program penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dalam rangka stabilitasi harga belum optimal dan memadai, karena penempatan PLDPM belum merata.
3. Pengawasan keamanan pangan belum optimal, terutama untuk komoditi pangan segar berupa sayuran dan buah buahan.
4. Pencapaian penanganan kerawanan pangan masih belum optimal akibat kurangnya sumberdaya manusia.
5. Penguatan kelembagaan lumbung pangan dan perluasan desa mandiri pangan masih belum maksimal.
6. Kualitas SDM masih rendah, sehingga teknologi usaha perikanan belum bias dikuasai sepenuhnya.
7. Lemahnya permodalan merupakan masalah klasik belum bisa terpecahkan secara tuntas. Di sisi lain lembaga perkreditan/perbankan kurang berminat menyalurkan kredit, karena usaha perikanan dinilai berisiko tinggi.
8. Tumpang tindih pemanfaatan lahan yang terus terjadi, sebagai akibat dari belum optimalnya penyusunan tata ruang dan pengendaliannya.
9. Degradasi sumberdaya perikanan karena eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan maupun dampak dari kegiatan lain, misalnya adanya perkebunan sawit, stockpile batubara.
10. Mutu produk olahan perikanan yang memiliki mutu rendah sehingga bernilai jual rendah.



11. Perubahan musim yang tidak menentu akibat dari *global warming effect* (pemanasan global) yang sangat merugikan bagi pembudidaya dan nelayan.
12. Mulai dilaksanakannya AFTA sebagai wujud diawalinya liberalisasi investasi dan perdagangan global (APEC 2010 dan WTO 2020). Sebagai indikasi, saat ini makin meningkatnya akses produk-produk asing terhadap pasar dalam negeri sebagai konsekuensi pelaksanaan perdagangan bebas. Hal ini menyebabkan persaingan produk-produk perikanan yang semakin ketat.

Adapun **Isu Strategis** yang diangkat oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Rencana Strategis 2023–2026 adalah sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya stok cadangan pangan dan distribusi pangan serta minimnya ketersediaan produk pangan;
- b) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya sector perikanan;
- c) Belum Maksimalnya Capaian Komponen Manajemen Kinerja SKPD.

Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdaya guna termasuk pembangunan yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan instansi lainnya.

#### IV. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala ini disusun berdasarkan amanat peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas



- Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
  5. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

## **V. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menyajikan Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan Ringkasan Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan akuntabilitas kinerja yang meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### I. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 tanggal 31 Maret Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis 2023 – 2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala maka Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala adalah:

#### 2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi SKPD.

#### 2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

#### 2.3 Indikator

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Sebagaimana Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut:



Tabel: 2.1

**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra  
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala  
Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	Meningkatnya kemandirian, Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
2.	Meningkatnya Pendapatan Per Kapita Sektor Pertanian	PDRB Perkapita	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

## II. PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas



Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel : 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnyake mandirian, diversifikasi dan keamanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	180	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	785.611.845,-
					Pengawasan Keamanan Pangan	93.996.450,-
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	21.662	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan Perikanan Tangkap</li><li>• Pengelolaan Perikanan Budidaya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 702.265.220,-</li><li>• 835.137.967,-</li></ul>
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai	81,93	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.844.854.988,-



Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala memiliki 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu:

- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- Jumlah Produksi Perikanan
- Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

#### **✚ Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dipengaruhi oleh ketersediaan pangan berupa ketersediaan energi dan ketersediaan protein untuk mengarahkan masyarakat mengkonsumsi pangan yang beragam, karena secara alamiah masyarakat akan mengkonsumsi apa yang tersedia di lingkungan dan di pasaran serta dipengaruhi pola konsumsi pangan yaitu konsumsi energi dan konsumsi protein yang erat kaitannya dengan Jumlah Anggota Keluarga, Tingkat Pendidikan, Budaya, Lingkungan dan Peraturan Pemerintah. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) program utama yaitu Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan anggaran Rp. 785.611.845,- dan Pengawasan Keamanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 93.996.450,-.

#### **✚ Indikator Jumlah Produksi Perikanan**

Jumlah Produksi Perikanan dipengaruhi oleh capaian produksi perikanan tangkap baik penangkapan di laut dan perairan umum dan capaian produksi budidaya yang berasal dari budidaya tambak, kolam, karamba, karamba jaring apung, mina padi. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) program utama yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp. 835.137.967,- dan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp. 702.265.220,-.

#### **✚ Indikator Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja



*Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP)*

instansi pemerintah. Selain program teknis yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian indicator kinerja utama, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga memiliki 1 (satu) program pendukung yang dijalankan oleh Sekretariat. Program tersebut adalah Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.844.854.988,-.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2023-2026, RKT Tahun 2024, Renja Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performancegap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performanceimprovement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

**Tabel.3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
=100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010,sebagai berikut:

**Tabel.3.2**  
**Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai**

No.	Kategori	Capaian
1.	Sangat baik	>90
2.	Baik	75–89,99
3.	Cukup	65–74,99
4.	Kurang	50–64,99
5.	Sangat kurang	0–49,99

### **I. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Nomor 060.1/033/DKPP/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.



Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**  
**Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kemandirian, diversifikasi dan keamanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	180	182,79	101,55
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	21.662	21.116,879	97,48
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai	81,93	79,69	97,26

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan**  
**Perikanan Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan**  
**Persentase Tahun 2024**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
=100	Tercapai/Sesuai target	-
>100	Melebihi target	1

Dari tabel diatas digambarkan bahwa capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala berdasarkan persentase yang melebihi target ada 1 (satu) yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan persentase 101,55%. Terdapat 2 (dua) IKU yang tidak mencapai target yaitu Jumlah Produksi Perikanan dengan persentase 97,48% dan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan persentase 97,26%.

**Tabel 3.5**  
**Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan**  
**Perikanan Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan**  
**Kategori Tahun 2024**

No.	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1.	Sangat baik	>90	3
2.	Baik	75–89,99	0
3.	Cukup	65–74,99	0
4.	Kurang	50–64,99	0
5.	Sangat kurang	0–49,99	0

Dari tabel diatas digambarkan bahwa capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan kategori ada 3 (tiga) indikator sasaran capaiannya melebihi 90%, sehingga semua indikator sasaran dinas masuk dalam kategori “**Sangat Baik**”



## II. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Nomor 060.1/033/DKPP/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator**  
**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala**

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kemandirian, diversifikasi dan keamanan pangan	1 Indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Produksi Perikanan	1 Indikator
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1 Indikator



Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki 3 sasaran strategis yaitu Sasaran Strategis “Meningkatnya kemandirian, diversifikasi dan keamanan pangan” dengan 1 indikator sasaran, Sasaran Strategis “Meningkatnya Produksi Perikanan” dengan 1 indikator sasaran dan Sasaran Strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ” juga dengan 1 indikator sasaran.

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**  
**Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	101,55	Melebihi target
2	Sasaran Strategis 2	1	97,48	tidak tercapai
3	Sasaran Strategis 3	1	97,26	tidak tercapai

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ada 3 (tiga) sasaran strategis dengan jumlah 1 indikator sasaran strategis dengan capaian sasaran sebesar 101,55% berpredikat “Melebihi Target”, 1 indikator sasaran strategis dengan capaian sasaran sebesar 97,48% berpredikat “Tidak tercapai”, dan 1 indikator sasaran strategis dengan capaian sasaran sebesar 97,26% berpredikat “Tidak tercapai”.

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**  
**Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran 1	1	101,55	-	-	-	-	√
2.	Sasaran 2	1	97,48	-	-	-	-	√
3.	Sasaran 3	1	97,26	-	-	-	-	√



Dari tabel di atas menggambarkan Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ada 1 (satu) sasaran dengan jumlah 1 indikator dan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 101,55 % dengan kategori “sangat baik”; 1 (satu) sasaran dengan jumlah 1 indikator dan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 97,48% dengan kategori “sangat baik” dan 1 (satu) sasaran dengan jumlah 1 indikator dan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 97,26% juga dengan kategori “sangat baik”.

**Tabel 3.9**  
**Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten BaritoKuala Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Sasaran Strategis 1	1	101,55	√	√	-	-	-	-
2.	Sasaran Strategis 2	1	97,48	-	-	-	-	√	√
3.	Sasaran Strategis 3	1	97,26	-	-	-	-	√	√

**SASARAN STRATEGIS 1. MENINGKATNYA KEMANDIRIAN, DIVERSIFIKASI DAN KEAMANAN PANGAN**

Sasaran “Meningkatnya Kemandirian, Diversifikasi dan Keamanan Pangan” adalah merupakan pengimplementasian dari Misi 1 pada RPD yaitu **Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal dengan mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan** pada tujuan RPD “Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah”.



Sebagai upaya pencapaian sasaran ini Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Capaian sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kemandirian, Diversifikasi dan Keamanan Pangan**  
**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Target Tahun 2024	%
			Target	Realisasi			
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	180	182,79	101,55	180	101,55
	Rata-rata						

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.Barito Kuala*

Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Tujuan penyusunan PPH adalah rasionalisasi pola ketersediaan pangan yang dianjurkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan pangan yang kemudian digunakan sebagai bahan penilaian ketersediaan pangan penduduk (jumlah, mutu, keseimbangan gizi dan komposisi/aneekaragam pangan).

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh melalui penjumlahan antara Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi. Pada tahun 2024 Skor PPH Ketersediaan mencapai skor **92,36** yang diperoleh dari formulasi penghitungan Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM). Neraca Bahan Makanan (NBM) menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Semakin tinggi skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan



akan semakin beragam gizi pangan yang tersedia untuk di konsumsi masyarakat. Situasi ketersediaan pangan NBM memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah, dan tidak menggambarkan situasi ketersediaan pangan individu.

Sedangkan untuk Skor PPH Konsumsi pada tahun 2024 mencapai skor **90,43** yang diperoleh melalui Survey Konsumsi Pangan pada 3 (tiga) wilayah karakteristik yaitu wilayah pertanian, perikanan dan perkotaan. Hasil survey tersebut kemudian diolah melalui aplikasi Analisis Data Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten/Kota. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi diperoleh dari Analisis pola konsumsi pangan masyarakat. Pola konsumsi pangan ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Semakin tinggi skor PPH Konsumsi, semakin beragam dan seimbang gizi pangan yang dikonsumsi. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi digunakan untuk menilai situasi konsumsi pangan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan Skor PPH Ketersediaan dan perhitungan Skor PPH Konsumsi didapatkan Skor PPH sebesar 182,79 yang terdiri dari penambahan Skor PPH ketersediaan dengan skor 92,36 dan Skor PPH konsumsi dengan skor 90,43.

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor Pola Pangan Harapan (PPH)} = \text{Skor Pola Pangan Ketersediaan} + \text{Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi}$$

Data Skor Pola Pangan Ketersediaan diperoleh berdasarkan formulasi perhitungan Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2024 yang bersumber dari Dinas ketahanan pangan dan perikanan sedangkan Skor pola pangan harapan konsumsi berdasarkan data skor PPH Kabupaten/kota tahun 2024 yang bersumber dari BPS Susenas tahun 2024.

$$\begin{aligned}\text{Skor Pola Pangan Harapan (PPH)} &= 92,36 + 90,43 \\ &= 182,79\end{aligned}$$



### 1. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2024.

Pada tahun 2024, realisasi atas Skor Pola Pangan Harapan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah 182,79 skor. Sedangkan target sesuai RENSTRA untuk tahun 2024 adalah 180 skor.

Dengan demikian capaian tahun 2024 adalah 101,55 %.

Tabel 3.11

#### Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	180	182,79	101,55

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kemandirian, Diversifikasi dan Keamanan Pangan” ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Sehingga rata rata capaian kinerja sasaran adalah 101,55 %, predikat nilai capaian kinerja “Melebihi Target” dan predikat capaian kinerja “Sangat Baik”

### 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2024 dibanding dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12

#### Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Ton	171,6	172,5	177,05	178,45	182,79

Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2024 sebesar skor 182,79 sedangkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2023 sebesar skor 178,45. Disini



dapat dilihat, bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami kenaikan sebesar 2,43%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 Dengan Target Dalam Dokumen Renstra.

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mulai dari tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2024 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian s/d 2024 terhadap 2026
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	175,05	180	182,79	182,5	100,16%

Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2023 sebesar skor 178,45, sedangkan target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada akhir RENSTRA sebesar skor 182,5. Sehingga capaian indikator tahun 2024 dibanding dengan target akhir renstra sebesar 100,16%.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Standart Provinsi dan Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan terhadap capaian kinerja kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Utama Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan stándar Nasional**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Standar Nasional
			Kab. Barito Kuala	Kota Banjarbaru	Prov. Kalsel	
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	182,79	181,90	172,69	190,8*

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel

Keterangan : \* angka masih bersifat sementara



Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2024 sebesar skor 182,79 sedangkan Capaian Kinerja Kota Banjarbaru Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar skor 181,90. Terdapat selisih lebih tinggi skor PPH Kabupaten Barito Kuala sebesar skor 0,89. Sehingga selisih capaian indikator tahun 2024 dibanding dengan Standar Kota Banjarbaru sebesar 0,49%. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi keragaman gizi dan ketersediaan pangan di Kabupaten Barito Kuala lebih beragam dibanding keadaan di Kota Banjarbaru.

Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2024 sebesar skor 182,79 sedangkan Capaian Kinerja Provinsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar skor 172,69. Terdapat selisih lebih tinggi skor PPH Kabupaten Barito Kuala sebesar skor 10,1. Sehingga selisih capaian indikator tahun 2024 dibanding dengan Standar provinsi sebesar 5,52%. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi keragaman gizi dan ketersediaan pangan di Kabupaten Barito Kuala lebih beragam dibanding keadaan di tingkat provinsi.

Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2024 sebesar skor 182,79 sedangkan Capaian Kinerja Nasional Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar skor 190,8. Terdapat selisih lebih tinggi skor PPH Tingkat Nasional dibandingkan dengan Kabupaten Barito Kuala sebesar skor 8,01. Sehingga selisih capaian indikator tahun 2024 dibanding dengan Standar Nasional sebesar 4,20%. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi keragaman gizi dan ketersediaan pangan di tingkat Nasional masih lebih beragam dibanding keadaan di Kabupaten Barito Kuala.

## **5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan**

Dari capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan adanya keberhasilan dari target yang ingin dicapai.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 pada Sasaran “Meningkatnya Kemandirian, Diversifikasi dan Keamanan Pangan” ditunjang dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan dinas melalui Bidang Ketahanan Pangan berupa :

- pembinaan kelompok lumbung pangan masyarakat
- koordinasi lintas sektor dalam rangka penyediaan data dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
- pemantauan ketersediaan dan harga pangan baik dipasar tradisional maupun ke lokasi Lumbung Pangan Masyarakat
- Sosialisasi dan edukasi tentang konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan



Aman (B2SA) telah mencapai sasaran yang diharapkan, sehingga masyarakat telah memahami arti pentingnya mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), baik melalui Lomba cipta Menu B2SA maupun kegiatan Sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada kader pangan B2SA posyandu yang dilakukan bersama sama OPD lain seperti PKK dan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

**6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Efisiensi bagi kinerja fisik lebih besar atau sama dengan 100% dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya)**

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 1 **Meningkatnya Kemandirian, Diversifikasi dan Keamanan Pangan** dialokasikan dana dalam DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi anggaran untuk indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar Rp. 876.965.508 dari total pagu Rp. 879.608.295 dengan capaian kinerja 101,55%

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{879.608.295 \times 100\% - 876.965.508}{879.608.295 \times 100\%} \times 100\% \\ &= 0,3\% \end{aligned}$$

Ket : 101,55% dijadikan 100%

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	%	
<b>Meningkatnya Kemandirian, Diversifikasi dan Keamanan Pangan</b>	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	180	182,79	101,55	879.608.295	876.965.508	99,70	0,3

Dapat disimpulkan dari tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa berdasarkan SK Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/293/KUM/2023 tentang pengukuran kinerja Kabupaten Barito Kuala, pada sasaran Meningkatkan kemandirian, diversifikasi dan keamanan pangan terdapat efisiensi karena masih dibawah batas maksimal nilai efisiensi yaitu 20%.



## 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Kinerja

Untuk menunjang pencapaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kemandirian, Diversifikasi dan Keamanan Pangan dengan Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dituangkan dalam Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Pengawasan Keamanan Pangan melalui kegiatan :

- a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Keseimbangan.
- c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- d. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

### SASARAN STRATEGIS 2. MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN

Sasaran “Meningkatnya Produksi Perikanan” adalah merupakan pengimplementasian dari Misi 1 pada RPD yaitu **Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan local dengan mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan** pada tujuan RPD “Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah”.

Sebagai upaya pencapaian sasaran ini Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Jumlah Produksi Perikanan.

Capaian sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.15**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Produksi Perikanan**  
**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Target Tahun 2024	%
			Target	Realisasi			
1.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	21.662	21.116,879	97,48	21.662	97,48
	Rata-rata						

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala

$$\text{Jumlah Perikanan} = \frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan}}{\text{Target produksi perikanan}} \times 100 \%$$

Data Jumlah Produksi Perikanan Budidaya diperoleh dari jumlah keseluruhan dari produksi perikanan budidaya ikan yang berasal dari tambak, kolam, karamba dan Karamba Jaring Apung (KJA), Mina padi sedangkan Data Jumlah Produksi Perikanan Tangkap diperoleh dari hasil penangkapan perairan laut dan perairan umum yang bersumber dari Dinas Ketahanan pangan dan perikanan

$$\text{Jumlah Perikanan} = \frac{21.116,879 \text{ ton}}{21.662 \text{ ton}} \times 100 \%$$
$$= 97,48\%$$

Jumlah produksi perikanan adalah jumlah keseluruhan dari produksi perikanan budidaya ikan yang berasal dari tambak, kolam, karamba dan Karamba Jaring Apung (KJA), Mina padi ditambah dengan jumlah produksi penangkapan ikan yang berasal dari penangkapan perairan laut dan perairan umum.

Penghitungan Jumlah Produksi Perikanan pada Tahun 2024 diperoleh melalui Sistem Satu Data milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pengumpulan data dilakukan oleh enumerator yang terdiri dari Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu. Data survey dari enumerator kemudian diolah melalui penghitungan statistik. Hasil dari penghitungan statistik tersebut kemudian divalidasi oleh validator statistik dinas dengan membandingkan data yang ada pada dinas.



Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator Jumlah Produksi Perikanan adalah sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Produksi Perikanan} = \text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya} + \text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Produksi Perikanan} &= 11.940,269 \text{ ton} + 9.176,61 \text{ ton} \\ &= 21.116,879 \text{ ton} \end{aligned}$$

### 1. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2024.

Pada tahun 2024, realisasi atas Jumlah produksi perikanan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah 21.116,879 ton. Sedangkan target sesuai RENSTRA untuk tahun 2024 adalah 21.662 ton. Dengan demikian capaian tahun 2024 adalah 97,48%. Realisasi jumlah produksi perikanan yang diperoleh dari sistem Satu Data melalui hasil penghitungan statistik budidaya dan statistik penangkapan sebesar 21.116,879 ton yang terdiri dari penambahan jumlah produksi budidaya sebanyak 11.940,269 ton atau 100,07 % dari target 11.932 ton dan produksi penangkapan sebanyak 9.176,61 ton atau 94,31% dari target 9.730 ton. Dari hasil penghitungan statistik, produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap tidak mencapai target yang diinginkan. Hasil penghitungan statistik budidaya dan penangkapan “terlampir”.

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Jumlah Produksi Perikanan**  
**Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Produksi Perikanan	Ton	21.662	21.116,879	97,48

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Produksi Perikanan” ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu “Jumlah Produksi Perikanan”. Sehingga rata rata capaian kinerja sasaran adalah 97,48% dengan predikat nilai capaian kinerja “Tidak Tercapai” dan predikat capaian kinerja “Sangat Baik”.

### 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Produksi Perikanan tahun 2024 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Jumlah Produksi Perikanan**  
**Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan	Ton	19.857,130	18.738,02	20.034,348	21.609,332	21.116,879

Realisasi Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2024 sebanyak 21.116,879 ton, sedangkan Jumlah Produksi Perikanan pada Tahun 2023 sebanyak 21.609,333 ton. Disini dapat dilihat, bahwa Jumlah Produksi Perikanan mengalami penurunan sebesar 2,28%.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 Dengan Target Dalam Dokumen Renstra.**

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Produksi Perikanan mulai dari tahun awal Renstra tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Terhadap Target Tahun 2024**  
**Jumlah Produksi Perikanan**

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian s/d 2024 terhadap 2026
Jumlah Produksi Perikanan	20.146	21.662	21.116,879	21.766	97,02%

Realisasi Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2024 sebanyak 21.116,879 ton. Sampai dengan Tahun 2024 jumlah produksi perikanan sebanyak 21.116,879 ton, sedangkan target Jumlah Produksi Perikanan pada akhir RENSTRA sebanyak 21.766 ton. Sehingga capaian indikator sampai dengan tahun 2024 dibanding dengan target akhir renstra sebesar 97,02%.

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Standart Provinsi dan Nasional**



Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Produksi Perikanan terhadap capaian kinerja kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Utama Jumlah Produksi Perikanan Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Estándar Nasional**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Standar Nasional
			Kab. Barito Kuala	Kota Banjarbaru	Prov. Kalsel	
1.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	21.116,879	464,37	365.408,238	13.070.000*

*Kab. Barito Kuala: data tahun 2024.*

*Kab. Banjarbaru dan Prov. Kalsel: data tahun 2024*

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel*

*Keterangan : \* angka masih bersifat sementara*

Capaian indikator sasaran “Jumlah Produksi Perikanan” Kabupaten Barito Kuala sebanyak 21.116,879 ton, sedangkan realisasi capaian jumlah produksi perikanan Kota Banjarbaru 464,37 ton. Terdapat selisih lebih tinggi Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Barito Kuala sebesar 20.652,509 ton. Hal ini menggambarkan jumlah produksi perikanan Kabupaten Barito Kuala lebih tinggi yaitu 4.447,42% dari jumlah produksi perikanan Kota Banjarbaru yang meliputi produksi perikanan tangkap dan budidaya.

Capaian indikator sasaran “Jumlah Produksi Perikanan” kabupaten Barito Kuala sebanyak 21.116,879 ton, jumlah produksi perikanan provinsi 365.408,238 ton. Terdapat selisih lebih tinggi Jumlah produksi perikanan provinsi dibanding Kabupaten Barito Kuala sebesar 344.291,359 ton. Hal ini menggambarkan jumlah produksi perikanan Kabupaten Barito Kuala hanya 5,77% dari jumlah produksi perikanan provinsi yang meliputi produksi perikanan tangkap dan budidaya.

Capaian indikator sasaran “Jumlah Produksi Perikanan” kabupaten Barito Kuala sebanyak 21.116,879 ton, jumlah produksi perikanan Nasional 13.070.000 ton. Terdapat selisih lebih tinggi Jumlah produksi perikanan nasional dibanding Kabupaten Barito Kuala sebesar 13.048.883,121 ton. Hal ini menggambarkan jumlah produksi perikanan Kabupaten Barito Kuala hanya 0,16% dari jumlah produksi perikanan nasional yang meliputi produksi perikanan tangkap dan budidaya.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Dari capaian indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan menunjukkan belum berhasil



mencapai target. Tidak tercapainya target capaian kinerja Tahun 2024 pada Sasaran “Meningkatnya Produksi Perikanan” disebabkan :

- Adanya sebagian nelayan yang beralih profesi
- Banyaknya mesin kapal dan alat tangkap yang sudah tidak layak pakai untuk wilayah perairan laut

Dari permasalahan tersebut, maka solusi yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

- Memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa alat penangkapan ikan ramah lingkungan kepada kelompok penangkapan melalui dana APBD.
- Melaksanakan pendampingan terhadap kelompok usaha bersama perikanan tangkap melalui bimbingan teknis pengembangan usaha perikanan tangkap bagi nelayan.
- Menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dengan penanganan kasus illegal fishing melalui kegiatan razia terpadu bersama dengan pihak kepolisian dan Kelompok Masyarakat Pengawasan (Pokmaswas).
- Untuk menjaga hasil produksi perikanan supaya tidak cepat rusak dan merangsang peningkatan konsumsi ikan, dilaksanakan diversifikasi olahan ikan melalui demo pengolahan ikan pada masyarakat nelayan.

**6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Efisiensi bagi kinerja fisik lebih besar atau sama dengan 100% dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya)**

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 2 **Meningkatnya produksi Perikanan** dialokasikan dana dalam DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah Produksi Perikanan sebesar Rp. 1.524.738.766 dari total pagu Rp. 1.537.403.063 dengan capaian kinerja 97,48%.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{1.537.403.063 \times 97,48\% - 1.524.738.766}{1.537.403.063 \times 97,48\%} \times 100\% \\ &= -1,65\% \end{aligned}$$



Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	%	
<b>Meningkatnya Produksi Perikanan</b>	Jumlah produksi perikanan	21.662	21.116,879	97,48	1.537.403.063	1.524.738.766	99,18	-1,65

Dapat disimpulkan dari tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa berdasarkan SK Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/293/KUM/2023 tentang pengukuran kinerja Kabupaten Barito Kuala, pada Sasaran Meningkatnya produksi perikanan terdapat efisiensi karena masih dibawah batas maksimal nilai efisiensi yaitu 20% sampai dengan -20%.

### 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Kinerja

Untuk menunjang pencapaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Perikanan dengan Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan dituangkan dalam Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

### SASARAN STRATEGIS 3. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi III RPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Sebagai upaya pencapaian sasaran ini Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Capaian sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.20**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD**  
**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Target Tahun 2024	%
			Target	Realisasi			
1.	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai	81,93	79,69	97,26	81,93	97,26
	Rata-rata						

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan adalah nilai yang menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Komponen-komponen penilaian dalam Evaluasi AKIP yang membentuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah:

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak ada formulasi perhitungan khusus untuk memperoleh realisasi Nilai Evaluasi SAKIP SKPD karena nilai yang digunakan adalah nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten. Sehingga jika ditampilkan maka formulasi perhitungannya menjadi:

### Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

#### 1. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2024.

Pada tahun 2024, realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Barito Kuala 700/153/IP/2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 79,69 atau predikat BB. Sedangkan target sesuai RENSTRA untuk tahun 2024 adalah 81,93 Nilai. Dengan demikian capaian tahun 2024 adalah 97,26%.



**Tabel .3.21**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Nilai Evaluasi SAKIP SKPD**  
**Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai	81,93	79,69	97,26%

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan” ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu “Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan”.

Sehingga rata rata capaian kinerja sasaran adalah 97,26% dengan predikat nilai capaian kinerja “Tidak Mencapai Target” dan predikat capaian kinerja “Sangat Baik”.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Evaluasi SAKIP SKPD tahun 2024 dibanding dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP**  
**Dinas Ketahanan pangan dan perikanan Tahun 2024 dengan Tahun Tahun**  
**sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai	72,82	73,68	80,16	80,90	79,69

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terjadi penurunan sebesar 1,49% pada realisasi Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2024 terhadap realisasi tahun 2023. Sedangkan rincian capaian nilai per komponennya adalah sebagai berikut :



Komponen	Bobot	Nilai 2023	Bobot	Nilai 2024
Perencanaan kinerja	30	26,16	30	26,16
Pengukuran kinerja	30	19,12	30	19,64
Pelaporan kinerja	15	14,79	15	14,68
Evaluasi internal	25	20,83	25	19,22
Pencapaian sasaran/kinerja organisasi	-	-	-	-
<b>Nilai hasil evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>80,90</b>	<b>100</b>	<b>79,69</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A</b>		<b>BB</b>

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 Dengan Target Dalam Dokumen Renstra.

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mulai dari tahun awal RPD hingga tahun 2024 terhadap target akhir RPD di tahun 2026 dapat dilihat pada tableberikut:

**Tabel 3.23**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Terhadap Target Tahun 2026**

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian s/d 2024 terhadap 2026
Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan	80,41	81,93	79,69	82,50	96,59%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.Barito Kuala

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir tahun Renstra pada tahun 2026 adalah sebesar 96,59%. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya perbaikan guna mengejar target akhir Renstra.



#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Standart Provinsi dan Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan terhadap capaian kinerja kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.24**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Utama**  
**Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**  
**Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan,**  
**Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Standar Nasional
		Kab. Barito Kuala	Kota Banjarbaru	Prov. Kalsel	
Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai	79,69 BB	70,65 BB	83,43 A	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kalsel

Capaian indikator sasaran “Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan” Kabupaten Barito Kuala sebesar 79,69, sedangkan realisasi capaian Nilai SAKIP SKPD Kota Banjarbaru 70,65. Terdapat selisih lebih tinggi Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala sebesar skor 9,04. Hal ini menggambarkan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala lebih tinggi yaitu 12,79% dari Nilai SAKIP SKPD Kota Banjarbaru.

Capaian indikator sasaran “Nilai SAKIP Dinas ketahanan pangan dan perikanan” kabupaten Barito Kuala sebesar 79,69, Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 83,43. Terdapat selisih lebih tinggi Nilai SAKIP SKPD Provinsi dibanding Kabupaten Barito Kuala sebesar 3,74 nilai. Hal ini menggambarkan Nilai SAKIP Dinas ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Barito Kuala hanya 95,52% dari Nilai SAKIP SKPD Provinsi.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Tidak tercapainya target indikator Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- Dokumen perencanaan kinerja (Dokumen Renja BAB II) belum sepenuhnya memuat informasi :



- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
  - Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah; dan
  - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- b. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja belum berbasis teknologi informasi
- c. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
- d. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya berpengaruh terhadap penyesuaian strategi, kebijakan, anggaran serta aktivitas dalam upaya pencapaian kinerja
- e. Pimpinan telah menetapkan Rencana Aksi, Jadwal Monev serta pengukuran kinerja secara periodic, namun pelaksanaan monev hanya periodic triwulanan
- f. Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya dengan pendalaman yang memadai. hal ini diketahui dari penyajian informasi pada laporan monev yang memuat informasi tentang target kinerja, realisasi kinerja, penyebab keberhasilan, hambatan/kendala, upaya perbaikan yang telah dilakukan dan rekomendasi, kalimat-kalimat yang dituangkan tidak berisi penjelasan yang memadai
- g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan, namun belum menggunakan teknologi informasi.

Namun demikian, di tengah keterbatasan waktu dan kondisi yang ada, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala terus berupaya melakukan upaya-upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja. Berikut disampaikan upaya-upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja sesuai rekomendasi hasil evaluasi



Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 :

- a. Melakukan perbaikan dokumen Rencana Kerja tahun 2025 dengan memuat informasi : realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- b. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan dokumen Renja dengan memanfaatkan pengukuran kinerja dalam penyesuaian strategi, kebijakan, anggaran serta aktivitas dalam upaya pencapaian kinerja pada saat penyusunan Renja dan Renja Perubahan pada periode mendatang
- c. Melaksanakan perbaikan pada laporan Monev dengan menyajikan informasi secara mendalam serta memadai secara bulanan seperti informasi penyebab keberhasilan, hambatan/kendala, upaya perbaikan yang telah dilakukan dan rekomendasi atas capaian kinerja yang tercapai maupun kinerja yang tidak tercapai
- d. Melaksanakan pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja internal dengan memanfaatkan teknologi informasi

**6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Efisiensi bagi kinerja fisik lebih besar atau sama dengan 100% dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya)**

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 3 **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** dialokasikan dana dalam DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi anggaran untuk indikator Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp. 5.594.330.745 dari total pagu Rp. 5.844.854.988 dengan capaian kinerja 97,26%

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$



$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{5.844.854.988 \times 97,26\% - 5.594.330.745}{5.844.854.988 \times 97,26\%} \times 100\% \\ &= 1,50\% \end{aligned}$$

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	81,93	79,69	97,26	5.844.854.988	5.594.330.745	95,71	1,50

Dapat disimpulkan dari tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa berdasarkan SK Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/293/KUM/2023 tentang pengukuran kinerja Kabupaten Barito Kuala, pada sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdapat efisiensi karena masih dibawah batas maksimal nilai efisiensi yaitu 20%.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Kinerja

Untuk menunjang pencapaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP SKPD dituangkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota yang didukung kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari penjabaran 3 (tiga) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala di atas, capaian sasaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah berikut :



**Tabel 3.25**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Selisih Capaian	Ket.
			Capaian	Capaian		
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	178,45	182,79	4,34	
2.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	21.609,332	21.116,879	492,453	
3.	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai	80,90	79,69	1,21	

**Tabel 3.26**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra**

No	Indikator SASARAN	Satuan	Realisasi	Target	Capaian (%)	Ket.
			2024	Akhir Renstra		
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	182,79	183	99,88	
2.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	21.116,879	21.766	97,02	
3.	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai	79,69	82,50	96,59	



**Tabel 3.27**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Provinsi dan Nasional**

No	Indikator SASARAN	Satuan	Relisasi 2024	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	182,79	172,69	190,8	
2.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	21.116,879	365.408,238	13.070.000	
3.	Nilai SAKIP Dinas ketahanan pangan dan perikanan	Nilai	79,69	83,43	-	

### III. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 8.261.866.346,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.996.035.019,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,78 %.

Komposisi belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk tahun 2024, sebagai berikut :

**Tabel 3.28**  
**Komposisi Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024**

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Operasi	8.207.426.346,-	7.942.981.019	96,78
2	Belanja Modal	54.440.000,-	53.054.000,-	97,45
<b>Jumlah</b>		<b>8.261.866.346,-</b>	<b>7.996.035.019,-</b>	<b>96,78</b>

Sumber: Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang jasa memberikan kontribusi sebesar 96,78 % terhadap realisasi belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024, dan sisanya sebesar 3,22% disumbangkan belanja modal.



Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.261.866.346,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.996.035.019,- atau 96,78 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.29**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis**  
**dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatnya kemandirian, diversifikasi dan keamanan pangan	879.608.295	. 876.965.508	99,70
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan	1.537.403.063	1.524.738.766	99,18
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.844.854.988	5.594.330.745	95,71
	<b>Jumlah</b>	8.261.866.346,-	7.996.035.019,-	96,78

Sumber: Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun 2024.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.30**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya kemandirian, diversifikasi dan keamanan pangan	1	101,55	876.965.508	99,70
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	1	97,48	1.524.738.766	99,18



3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	97,26	5.594.330.745	95,71
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>98,76</b>	<b>7.996.035.019</b>	<b>96,78</b>

Capaian kinerja sasaran rata rata mencapai 98,76% dengan realisasi keuangan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran sebesar 96,78%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

#### IV. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat 1 (satu) sasaran menunjukkan pencapaian >100% sedangkan 2 (dua) sasaran kurang dari 100%.

. Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat cukup tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.31**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**  
**Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**  
**Tahun 2024**

No.	Sasaran Kinerja Kegiatan (SKK)	Capaian Keluaran Kegiatan (CK)	Anggaran		Efisiensi (%)
			Pagu Anggaran Keluaran (PAK)	Realisasi Anggaran Keluaran (RAK)	
1.	Meningkatnya kemandirian, diversifikasi dan keamanan pangan	101,55	879.608.295	876.965.508	0,3



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024

2.	Meningkatnya Produksi Perikanan	97,48	1.537.403.063	1.524.738.766	-1,65
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	97,26	5.844.854.988	5.594.330.745	1,50



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan Urusan Pangan dan Perikanan memiliki dan berperan dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yaitu : **“TERWUJUDNYA BARITO KUALA YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRI BISNIS”** sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Secara rinci **pencapaian sasaran Tahun 2024** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,55 % atau melebihi target
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97,48 % atau tidak mencapai target
3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97,26 % atau tidak mencapai target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut



dengan capaian nilai dalam kisaran 98,76%. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala DPA Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.261.866.346,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.996.035.019,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,78%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 265.831.327 atau 3,22%. Adapun anggaran belanja yang terkait dengan pencapaian sasaran tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.261.866.346,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.996.035.019,- atau 96,78 %.

## **B. Strategi Peningkatan kinerja Organisasi**

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja organisasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kerja sama dengan Bulog atau gudang pangan untuk menyimpan Cadangan Pangan Pemerintah serta regulasi dalam penyaluran CPP kepada masyarakat.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lumbung pangan yang ada di masyarakat.
3. Terlibat langsung dalam Tim Penanganan Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka penanganan inflasi, penanganan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis dan efisiensi rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok dengan cara melakukan pasar murah.
4. Menggencarkan sosialisasi tentang pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), menyajikan menu makanan berbasis pangan lokal pada setiap kegiatan rapat kedinasan, mendorong peningkatan konsumsi buah dan sayur pada tingkat rumah tangga, serta melakukan pembinaan kepada UKM pengolah pangan lokal non beras non terigu.
5. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sinkronisasi untuk meningkatkan pemahaman sumberdaya manusia baik petugas dalam hal penanganan keamanan pangan.
6. Melakukan promosi dan penyebaran informasi mengenai keamanan pangan melalui sosial media dan media informasi lainnya.



7. Memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya untuk kelompok pembudidaya ikan.
8. Melakukan pembinaan dan sosialisasi cara budidaya ikan yang baik kepada kelompok pembudidaya ikan.
9. Memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk kelompok usaha bersama perikanan tangkap.
10. Melakukan pembinaan dan sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan kepada kelompok usaha bersama perikanan tangkap.
11. Melakukan sosialisasi pengembangan usaha perikanan tangkap bagi nelayan.



# **LAMPIRAN**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Ardiansyah, S.Sos, M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mujiyat, S.Sn., M.Pd.

Jabatan : Pj. Bupati Barito Kuala

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 25 April 2024

Pihak Kedua,  
Pj. Bupati Barito Kuala

**MUJIYAT, S.Sn., M.Pd**

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
dan Perikanan

**H. ARDIANSYAH, S.Sos, M.AP**  
NIP. 19650508 198602 1 004



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kemandirian, diversifikasi dan keamanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	180 (Skor)	-	-	-	180
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan	21.662 (Ton)	4.576	9.846	15.840	21.662
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	81,93 (Nilai)	-	-	-	81,93

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 499.631.350	APBD
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 93.997.500	APBD
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 676.045.220	APBD
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 810.138.599	APBD
5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 4.734.590.102	APBD
TOTAL	Rp. 6.814.402.771	

Marabahan, 25 April 2024

Pihak Kedua,  
Pj. Bupati Barito Kuala

**MUJIYAT, S.Sn., M.Pd**

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

**H. ARDIANSYAH, S.Sos, M.AP**  
NIP. 19650508 198602 1 004



**Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan  
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan  
TAHUN 2024**

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	2,405	109.3	0.5	54.7	25.0	25.0	
2.	Umbi-umbian	334	15.2	0.5	7.6	2.5	2.5	
3.	Pangan Hewani	6,733	306.1	2.0	612.1	24.0	24.0	
4.	Minyak dan Lemak	12,328	560.4	0.5	280.2	5.0	5.0	
5.	Buah/biji berminyak	15,028	683.1	0.5	341.5	1.0	1.0	
6.	Kacang-kacangan	381	17.3	2.0	34.6	10.0	10.0	
7.	Gula	147	6.7	0.5	3.3	2.5	2.5	
8.	Sayuran dan buah	98	4.5	5.0	22.4	22.4	30.0	
9.	Lain-lain		-	-	-	-	-	
	Jumlah	37,455	1,702.5		1,356.4	92.36	100.0	

AKE = 2200 kkal/kap/hari

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	2,405	100.2	0.5	50.11	25.00	25.0	
2.	Umbi-umbian	334	13.9	0.5	6.95	2.50	2.5	
3.	Pangan Hewani	6,733	280.5	2.0	561.10	24.00	24.0	
4.	Minyak dan Lemak	12,328	513.7	0.5	256.83	5.00	5.0	
5.	Buah/biji berminyak	15,028	626.2	0.5	313.08	1.00	1.0	
6.	Kacang-kacangan	381	15.9	2.0	31.75	10.00	10.0	
7.	Gula	147	6.1	0.5	3.07	2.50	2.5	
8.	Sayuran dan buah	98	4.1	5.0	20.49	20.49	30.0	
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	37,455	1,560.6		1,243.39	90.49	100.0	

AKE = 2400 kkal/kap/hari



**PERKEMBANGAN KETERSEDIAAN  
ENERGI, PROTEIN DAN LEMAK PER KAPITA PER HARI  
TAHUN 2024**

Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori/Ha)	Protein (Gram/Hari)	Lemak (Gram/Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-padian	2,405	59	11
Makanan berpati	137	1	0
Gula	147	-	-
Buah biji berminyak	15,214	157	1,460
Buah-buahan	(2,238)	(30)	(45)
Sayur-sayuran	2,727	127	27
Daging	(8)	(0)	(1)
Telur	(11)	(1)	(1)
Susu	1	0	0
Ikan	6,750	1,194	172
Minyak dan Lemak	12,328	14	1,389
<b>Total</b>	<b>37,455</b>	<b>1,521.37</b>	<b>3,013.06</b>
<b>Nabati</b>	<b>38,842</b>	<b>497.55</b>	<b>2,939.14</b>
<b>Hewani</b>	<b>6,751</b>	<b>1,193.89</b>	<b>172.66</b>

KETERANGAN

\*\*) Rumput Laut masuk kelompok ikan.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jalan Panglima Sudirman No.5 Kotak Pos 29 Telpon (0511) 4772057 Fax. (0511)4772473  
BANJARBARU (Kode Pos 70711)

Banjarbaru, 11 November 2024

Skor PPH Kabupaten/Kota, 2024				
		Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	Skor PPH
		Mean	Mean	Mean
Provinsi	KALIMANTAN SELATAN	2198,30	69,20	92,29
Kabupaten/Kota	6301 KAB. TANAH LAUT	2152,65	64,02	88,46
	6302 KAB. KOTA BARU	2197,20	68,49	92,10
	6303 KAB. BANJAR	2262,30	70,19	91,53
	6304 KAB. BARITO KUALA	2278,33	65,98	90,43
	6305 KAB. TAPIN	2305,10	72,38	93,21
	6306 KAB. HULU SUNGAI SELATAN	2352,03	74,26	92,80
	6307 KAB. HULU SUNGAI TENGAH	2349,33	74,01	92,16
	6308 KAB. HULU SUNGAI UTARA	2199,82	66,23	91,30
	6309 KAB. TABALONG	2206,35	67,72	92,65
	6310 KAB. TANAH BUMBU	2141,93	70,21	94,17
	6311 KAB. BALANGAN	2338,48	71,41	91,64
	6371 KOTA BANJARMASIN	2076,65	70,19	89,36
	6372 KOTA BANJAR BARU	2004,19	65,81	88,59

Sumber: Susenas Maret 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**  
Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Marabahan 70513  
Telepon (0511) 4799180  
Website: [dkpp.baritokualakab.go.id](http://dkpp.baritokualakab.go.id) Email: [dkpp@baritokualakab.go.id](mailto:dkpp@baritokualakab.go.id)

**KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TOTAL PRODUKSI PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA)**  
**DI KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2024**

No	Uraian (Ton)	Jumlah Total Produksi (Ton)	Keterangan
1.	Produksi Perikanan Tangkap	9.176,61	
2.	Produksi Perikanan Budidaya:	11.940,269	
<b>Jumlah</b>		<b>21.116,879</b>	

Marabahan, 9 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala,



**H. ARDIANSYAH, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650508 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKAMAN  
Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telp./Faksimile: (0511) 4799180  
M A R A B A H A N 70513

DATA PRODUKSI PERIKAMAN TANGKAP TAHUN 2024

	Januari	Pebruari	Maret	TW 1	April	Mei	Juni	TW 2	Juli	Agustus	September	TW 3	Oktober	November	Desember	TW 4	LAUT	PUD	TOTAL
1 LAUT	275,8	263,9	271,6	811,3	270,7	275,1	276,4	822,2	316,8	286	285,4	888,2	282,7	298,2	301,4	882,3	3404		
2 RAWA	4,34	4,29	4,32	12,95	4,29	5,21	6,84	16,34	8,39	7,56	5,49	21,44	4,86	5,44	6,75	18,05		68,78	
3 SUNGAI	447,53	464,77	483,94	1394,24	409,23	427,48	484,1	1320,81	335,16	517,96	474,03	1527,15	467,29	494,36	499,98	1461,63		5703,83	
Jumlah Produksi (Ton)	727,67	732,96	757,86	2218,49	684,22	707,79	767,34	2159,35	860,35	811,52	764,92	2436,79	754,85	799	808,13	2361,98	3404	5772,61	9.176,61

Marabau, 21 Januari 2025

Kepala Dinas,

H. ARDIANSYAH S. SOS. M. AP  
NIP. 196505081986021004





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
 Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telp/Faksimile. (0511) 4799180  
 MARABAHAN 70513

PRODUKSI IKAN PADA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 Semester 1

Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Barito Kuala (kg), 2024

Kecamatan	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni		
	Tambak	Kolam	KUA	Tambak	Kolam	KUA	Tambak	Kolam	KUA	Tambak	Kolam	KUA	Tambak	Kolam	KUA	Tambak	Kolam	KUA
Tabungenen	738.450	650	-	730.030	750	-	707.346	750	-	1.322.000	500	-	850.000	500	-	600.000	-	-
Tamban	-	850	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	2.907	-	-	635	-
Mekarsari	-	3.270	-	-	-	-	-	-	-	-	1.025	-	-	-	-	-	-	-
Anjir Pasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anjir Muara	-	-	-	-	840	-	-	-	-	-	-	-	-	552	-	-	870	-
Alalak	-	-	-	-	1.130	-	-	-	-	-	1.100	-	-	935	-	-	200	-
Mandastana	-	130	-	-	100	-	-	-	-	-	250	-	-	140	-	-	200	-
Jejangkit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	-
Belawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400	-
Wanaraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barambai	-	-	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-
Rantau Badauh	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-
Cerbon	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
Bakumpai	-	-	2.618	-	-	1.350	-	-	-	-	-	1.660	-	-	1.050	-	-	3.130
Merabahan	-	-	15.650	-	-	10.500	-	-	-	-	-	18.000	-	-	23.000	-	-	20.000
Tabukan	-	-	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuripan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barito Kuala	738.450	4.900	18.268	730.030	5.690	11.850	707.346	750	21.104	1.322.000	4.075	22.660	850.000	5.234	24.050	600.000	4.245	23.130
Jumlah (kg)	761.618			747.570			729.200			1.348.735			879.284			627.375		

Kabupaten, 9 Januari 2025  
 Kepala Dinas,  
 H. ARDIANSYAH, S.Sos, M.AP  
 NIP. 19680508 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS KETAHANAN PANGGAN DAN PERIKANAN  
Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telp/Faksimile: (0511) 4799180  
M A R A B A H A N 70513

PRODUKSI IKAN PADA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 Semester 2

Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Barito Kuala (kg), 2024

Kecamatan	Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember			Jumlah Semester I + Semester II
	Tambak	Kolam	KUA	Tambak	Kolam	KUA													
Tabungaren	1.150.000	-	-	1.073.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674.500	-	-	11.641.876
Tamban	-	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615	-	7.672
Mekarsari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.295
Anjir Pasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anjir Muara	-	-	-	-	750	-	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	5.332
Alalak	-	618	-	-	12	-	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.147
Mandastana	-	150	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.470
Jejangkit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240
Belawang	-	-	-	-	-	-	-	7380	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	11.880
Wanaraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.770
Barambai	-	480	-	-	350	-	-	820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550
Rantau Badauh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530
Cerbon	-	100	-	-	50	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
Bakumpai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000
Marabahan	-	-	25.000	-	-	-	-	-	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.150
Tabukan	-	-	-	-	215	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.845
Kuripan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barito Kuala	1.150.000	1.998	25.000	1.073.000	1.877	24.000	1.415.000	9.932	18.000	1.215.000	-	21.000	1.163.400	4.315	23.000	674.500	1.865	24.600	11.940.269
Jumlah (kg)	1.176.998			1.098.877			1.442.932			1.236.000			1.190.715			700.965			

Kepala Dinas,  
Maringgan, 9 Januari 2025





## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA INSPEKTORAT

Jalan Jend. Sudirman Nomor 70 Telpn ( 0511 ) 4799050 Marabahan 70511

Nomor : 700/153/IP/2024  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Marabahan, 08 Juli 2024

Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
di -  
Marabahan

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, dengan uraian sebagai berikut :

### I. Pendahuluan

#### a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188/551/KUM/2023 tentang Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Tugas Inspektur Nomor: 094/074/SET/INSPT tanggal 24 Juni 2024 untuk Melaksanakan Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2024 pada SKPD di lingkup wilayah Irbn IV.

#### b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan



akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi SAKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- (b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP; dan
- (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Adapun ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup hal-hal berikut:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

e. Metodologi Evaluasi



Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi SAKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan Teknik evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP ini adalah:

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh SKPD secara mandiri. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi, yang tersedia seperti telepon, Chat, ataupun digital meeting.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada SKPD.

f. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala, maka SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki tugas fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2. Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap;



- b) Pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- c) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- d) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- e) Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan perikanan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi ketahanan pangan dan perikanan.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dibentuk susunan/struktur organisasi yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris Dinas
- 3) Bidang Ketahanan Pangan yang dibantu Analis Ketahanan Pangan
- 4) Bidang Perikanan Budidaya yang dibantu Analis Akuakultur
- 5) Bidang Perikanan Tangkap yang dibantu Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
- 6) Unit Pelaksana Teknis
- 7) Jabatan Fungsional

g. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala telah berupaya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, hal-hal yang telah dilakukan adalah:

- 1. Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan dokumen Renja dengan memperhatikan Penjabaran kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya dalam LKJIP SKPD untuk dijadikan langkah perbaikan yang kemudian dimuat dalam Renja Tahun mendatang
- 2. Membuat rekomendasi atas hambatan/kendala yang dihadapi, upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk perbaikan kinerja, langkah nyata yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi pada periode monev sebelumnya dalam pelaksanaan Monev Rencana Aksi.
- 3. Membuat catatan kinerja harian dan atau laporan kinerja individu sesuai SKP untuk setiap ASN dalam pelaksanaan komitmen untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)



4. Menyusun pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date sehingga ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid, ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, terdapat penanggungjawab yang jelas, jelas waktu deliverynya, terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data
5. Mendokumentasikan kegiatan rapat monev dalam dokumen Rapat monev seperti Undangan, Daftar hadir, Notulen rapat, Foto Kegiatan Dalam pelaksanaan Pengukuran Kinerja
6. Melaksanakan pengumpulan data kinerja dengan memenuhi kriteria : Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yang mensupervisi, serta sumber data valid); Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal
7. Melaksanakan penyusunan dokumen Perencanaan Kinerja jika mengalami pergeseran atau perubahan dimana hasil dari monitoring evaluasi triwulan dijadikan dasar dan dimanfaatkan untuk penyesuaian kegiatan, sub kegiatan, dan rincian belanja, serta untuk penyesuaian target dan anggaran

## II. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan nilai sebesar **79,69** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**sangat baik**", yaitu **implementasi AKIP** memberikan gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,16	26,16
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,12	19,64
3.	Pelaporan Kinerja	15	14,79	14,68
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,83	19,22
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,90	79,69
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>A</b>	<b>BB</b>



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka hasil evaluasi tahun 2024 mengalami *peningkatan* pada komponen Pengukuran Kinerja, tetapi mengalami *penurunan* pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sehingga berdampak pada hasil evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang mengalami *penurunan* dibandingkan tahun sebelumnya.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 sebagai berikut :

### 1. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, Perencanaan Kinerja mendapat nilai **26,16** dari standar nilai **30,00** atau pencapaian sebesar **87,19%** yang diperoleh dari hasil penilaian atas 3 (tiga) Sub Komponen *Perencanaan Kinerja*, sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai		Standar
		Capaian 2023	Capaian 2024	
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>26,16</b>	<b>26,16</b>	<b>30,00</b>
A	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6,00	6,00	6,00
B	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (Cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	8,35	8,35	9,00
C	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	11,81	11,81	15,00

*Perolehan Nilai pada Komponen Perencanaan Kinerja* pada tabel didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala telah menyusun perencanaan kinerja yang didahului dengan penyusunan Pohon Kinerja berdasarkan isu strategis yang dihadapi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 Perubahan, Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Rencana Aksi atas



- PK. Dokumen Perencanaan Kinerja disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2019;
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan seluruhnya telah dipublikasikan pada website [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) serta e-SAKIP Batola;
  - c. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah memenuhi kriteria tujuan dan sasaran yang baik dan dapat ditindaklanjuti secara nyata serta dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) yang memenuhi kriteria SMART, cukup dan bersifat sustainable;
  - d. Indikator Kinerja telah disertai dengan Penetapan target kinerja;
  - e. Target yang ditetapkan atas Indikator keberhasilan Tujuan dan sasaran strategis telah realistis, memungkinkan untuk dicapai, menunjukkan adanya keinginan untuk peningkatan kinerja dan tentunya lebih dari realisasi tahun 2023.
  - f. Perencanaan Kinerja yang disusun telah memberikan informasi yang cukup tentang kinerja yang harus dicapai, terlihat hubungan kausalitas, kesinambungan dan keselarasan pada tiap level jabatan;
  - g. Anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah mendukung dan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai
  - h. Rencana Aksi kinerja telah dipantau pertriwulan yang ditunjukkan dengan adanya Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi triwulanan.

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada tabel di atas, penilaian yang masih belum optimal ada pada pemanfaatan Perencanaan Kinerja, hal ini dikarenakan masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

Dokumen Perencanaan Kinerja (dokumen Renja BAB II) belum sepenuhnya memuat informasi :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



## 2. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, Pengukuran Kinerja mendapat nilai **19,64** dari standar nilai **30,00** atau pencapaian sebesar **65,45%**, yang diperoleh dari hasil penilaian atas 3 (tiga) Sub Komponen **Pengukuran Kinerja**, sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai		
		Capaian 2023	Capaian 2024	Standar
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>19,12</b>	<b>19,64</b>	<b>30,00</b>
A	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	4,40	4,40	6,00
B	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	4,37	4,89	9,00
C	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	10,35	10,35	15,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan sedikit peningkatan, namun masih memerlukan perbaikan pada segi kualitas maupun pemanfaatannya. Meskipun demikian terdapat beberapa hal positif yang telah dipenuhi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, yaitu :

- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dilengkapi dengan definisi operasional/ makna yang jelas, formulasi perhitungan yang tepat dan sumber data;
- Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur kinerja dan mendukung pencapaian kinerja yang diharapkan;
- Pengukuran Kinerja dilakukan setiap triwulan dan dalam mengukur kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selalu terlibat di setiap pengambilan keputusan;
- Hasil Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulannya.
- Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.



Meskipun demikian ada beberapa hal yang mempengaruhi kurang optimalnya nilai evaluasi pada komponen Pengukuran Kinerja adalah:

- a. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja belum berbasis teknologi informasi
- b. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional
- c. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya berpengaruh terhadap penyesuaian strategi, kebijakan, anggaran serta aktivitas dalam upaya pencapaian kinerja.

### 3. Pelaporan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, Pelaporan Kinerja mendapat nilai **14,68** dari standar nilai **15,00** atau pencapaian sebesar **97,86%**, yang diperoleh dari hasil penilaian atas 3 (tiga) Sub Komponen **Pelaporan Kinerja**, sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai		
		Capaian 2023	Capaian 2024	Standar
3	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>14,79</b>	<b>14,68</b>	<b>15,00</b>
A	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	3,00	3,00
B	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan /kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	4,50	4,50
C	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,29	7,18	7,50

Perolehan nilai pada komponen Pelaporan Kinerja dikarenakan:

- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah menyusun Laporan Kinerja atau LKJIP tahun 2023 sesuai standar yang mengacu pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diformalkan serta dilaporkan tepat waktu sebelum 31 Maret 2024 melalui website <https://esr.menpan.go.id> dan di e-SAKIP pada website induk



Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

<https://apps.baritokualakab.go.id>

- b. Dokumen LKJIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2023 juga telah menyajikan informasi-informasi kinerja secara memadai sesuai standar;

Meskipun demikian berdasarkan analisa terhadap data dukung implementasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan masih perlu peningkatan pada kegiatan Monev yang selama periode tahun 2024 diketahui :

Pimpinan telah menetapkan Rencana Aksi, Jadwal Monev serta pengukuran kinerja secara periodik, namun pelaksanaan monev hanya periodik triwulanan.

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, Evaluasi Internal mendapat nilai **19,22** dari standar nilai **25,00** atau pencapaian sebesar **76,88%**. yang diperoleh dari hasil penilaian atas 3 (tiga) Sub Komponen **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**, sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai		
		Capaian 2023	Capaian 2024	Standar
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	20,83	19,22	25,00
A	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	3,32	5,00	5,00
B	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	5,63	2,34	7,50
C	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	11,88	11,88	12,50

Perolehan nilai pada komponen **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** seperti pada tabel dikarenakan :

- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah memiliki pedoman teknis evaluasi internal berdasarkan Keputusan Kepala DKPP Nomor 523.1.2/031/DKPP/2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- Evaluasi Kinerja Internal Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah dilaksanakan pada setiap bidang



- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat pada tahun 2023 dan memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

Sedangkan beberapa permasalahan atau kekurangan yang masih harus diperbaiki adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya dengan pendalaman yang memadai. Hal ini diketahui dari penyajian Informasi pada laporan monev yang memuat informasi tentang target kinerja, realisasi kinerja, penyebab keberhasilan, hambatan/kendala, upaya perbaikan yang telah dilakukan dan rekomendasi, kalimat-kalimat yang dituangkan tidak berisi penjelasan yang memadai.
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun belum menggunakan Teknologi Informasi.

### III. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja tahun berikutnya agar menyempurnakan informasi yang berkaitan dengan :
  - Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
  - Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
  - Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
  - Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
  - Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
  - Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2) Memanfaatkan Pengukuran Kinerja dalam penyesuaian strategi, kebijakan, anggaran serta aktivitas dalam upaya pencapaian kinerja pada saat penyusunan Renja dan Renja Perubahan pada periode mendatang;
- 3) Menyajikan informasi pada laporan monev dengan pendalaman yang memadai secara bulanan seperti informasi penyebab keberhasilan,



hambatan/kendala, upaya perbaikan yang telah dilakukan dan rekomendasi atas capaian kinerja yang tercapai maupun kinerja yang tidak tercapai.

- 4) Memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja internal sehingga data kinerja dapat terdokumentasikan dengan baik, mudah ditelusuri serta dapat diandalkan;

#### IV. Penutup

Demikian disampaikan hasil evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 sebagai sarana informasi tentang implementasi SAKIP SKPD. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan, melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**INSPEKTUR,**



**SELAMAT RIYANTO, S.STP, M.Ec.Dev**

**Pembina**

**NIP. 19850226 200312 1 002**

#### Tembusan:

1. Pj Bupati Barito Kuala
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala BAPPELITBANG Kabupaten Barito Kuala
4. Arsip